

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : **BUMN/BUMD**
LEMBAGA : **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN**
UNIT KERJA : **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HENDRA INDRA RACHMAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **258045**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 15.580.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m²/300 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
2. Tanah Seluas 1812 m² di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1970 m² di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 280.000.000
4. Tanah Seluas 3610 m² di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/150 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/325 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 4.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m²/120 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 3.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/100 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 865.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV 1.5 TC PRESTIGE CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000



2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT
CKD/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX150H/TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 240.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.792.393.641

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 19.477.393.641

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 19.477.393.641

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.